

# **“Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) Di Sebelas Kelurahan Di Kota Padang“**

**Raymond Erico Bagariang**  
**07 153 020**

Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kepemimpinan lurah terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak PBB di sebelas kelurahan di Kota Padang. Metode yang digunakan adalah analisa kuantitatif, sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah teknik korelasi antar variabel untuk membuktikan adanya pengaruh dari kepemimpinan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Hasil penelitian ini adalah kepemimpinan lurah berpengaruh positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sebesar 27,7%.

Kata kunci : kepemimpinan lurah, kesadaran masyarakat, PBB, Kota Padang.

## **PENDAHULUAN**

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, daerah kota dan kabupaten mempunyai perangkat daerah yaitu kecamatan yang dipimpin oleh kepala kecamatan dalam tugasnya menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari walikota atau bupati, di dalam kecamatan juga mempunyai perangkat yaitu kelurahan yang dipimpin oleh lurah sebagai penerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari camat. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1007/KMK.0411985 tentang pelimpahan wewenang pungutan pajak kepada gubernur kepala pemerintahan provinsi dan walikota kepala pemerintahan kota dan bupati kepala pemerintahan kabupaten untuk selanjutnya diserahkan kepada organisasi dibawahnya sebagai usaha mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan, untuk itulah peranan kepala daerah sangat dituntut keaktifannya dalam hal pemungutan pajak ini.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu komponen yang mempunyai pengaruh terhadap besarnya pendapatan asli daerah terutama setelah ditetapkannya Undang Undang No 28 tahun 2009 yang menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah

khususnya PBB pedesaan dan perkotaan. Oleh karena itu, PBB perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dalam hal penanganannya, sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan PBB bagi pembiayaan pembangunan, maka pemungutan PBB harus dilakukan secara efektif, sehingga nantinya dapat memenuhi target pemungutan yang telah ditetapkan. Agar dapat dipungut secara efektif, pemahaman masyarakat, petugas pajak, dan setiap petugas terkait dengan pemungutannya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang undang serta peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah tersebut.

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk sumber keuangan negara dan pemungutannya sudah didasarkan pada undang-undang, ini berarti bahwa pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan sektor yang potensial, penerimaan dari sektor pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut adanya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kondisi masyarakat yang kurang atau bahkan tidak mengerti pajak, serta tingkat perkembangan intelektual masyarakat, sehingga mereka tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Mengingat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sangat penting untuk peningkatan penerimaan negara yang digunakan sebagian besar untuk daerah wajib itu sendiri.

Perlawanan pajak yang diikuti anggapan yang salah oleh masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan akan sangat merugikan bagi negara, oleh karena itu dalam rangka mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali hambatan-hambatan tersebut maka perlu diusahakan suatu kondisi yang membuat masyarakat wajib pajak menjadi sadar, mau dan mampu membayar pajak. Memberikan bimbingan dan penerangan kepada masyarakat mengenai manfaat pajak merupakan langkah yang paling penting dalam mensosialisasikan pajak tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan pengaruh kepemimpinan lurah sebagai kepala pemerintahan terdepan untuk dapat memanfaatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di daerahnya dan memotivasi aparatnya dan masyarakat agar dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Adanya sebagian besar masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban dalam membayar PBB otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan pajak. Hambatan dalam pemungutan PBB ini bukanlah merupakan usaha nyata dari masyarakat, namun karena kondisi masyarakat yang kurang sadar untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu seluk beluk fungsi pembayaran pajak itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kepemimpinan lurah terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Bagi lurah, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menjalankan peran sebagai motivator untuk meningkatkan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi rujukan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya penerimaan PBB.

Penelitian terdahulu menyimpulkan adanya pengaruh positif kepemimpinan lurah terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sebesar 31,47%.

## **KEPEMIMPINAN**

Herman Musakabe menuliskan bahwa pemimpin dan kepemimpinan adalah suatu yang tidak bisa dipisahkan ataupun diabaikan (*sine qua non*) dari kehidupan manusia, adalah hal yang wajar dan manusiawi jika kita rindu datangnya pemimpin dengan kepemimpinan yang dapat mengubah keadaan menjadi makin mengemuka. Pemimpin dengan kepemimpinannya memegang peran strategis dan menentukan dalam menjalankan roda suatu organisasi, meningkatkan kinerja suatu lembaga atau perusahaan dan bahkan menentukan pasang surutnya kehidupan suatu bangsa dan negara. Seorang pemimpin sejati harus memiliki jiwa melayani, sedangkan pemimpin semu hanya mementingkan ambisi pribadi untuk mendapatkan kekuasaan mereka (Musakabe, 2004 : 1). Baik atau buruk kondisi suatu organisasi, bangsa atau negara, secara tidak langsung menggambarkan potret dari kualitas pemimpinnya dan kepemimpinan yang dijalankan.

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu kapasitas yang mempunyai kemampuan atau hak untuk mengarahkan, membimbing, atau mendorong seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang merupakan kebijaksanaan atau perintah untuk tujuan tertentu.

## **KESADARAN MASYARAKAT**

Kesadaran masyarakat diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan mampu oleh masyarakat untuk menyeimbangkan, menyelaraskan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang didukung oleh adanya etika dan moral masyarakat tersebut. Kesadaran masyarakat akan mendorong timbulnya keinginan untuk memperhatikan kepentingan bersama guna mencapai kehidupan yang lebih baik.

Berkaitan dengan masalah pembayaran PBB, maka dalam memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat perlu lebih dikaitkan dengan gambaran kehidupan suatu masyarakat yang beraneka ragam. Keanekaragaman itu berhubungan dengan

faktor golongan sosial, politik atau ekonomi, serta tingkat pendidikan, sifat dan bentuk pekerjaan yang dilakukan. Dengan demikian, seperti yang dikatakan oleh Satjipto, Rahardja (Wiwoho, 1990 : 91) bahwa tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sesungguhnya bersumber pada sifat keanekaragaman masyarakat itu sendiri.

### **PENGARUH KEPEMIMPINAN LURAH**

Pengaruh kepemimpinan lurah ini merupakan kepemimpinan formal yang perilaku kepemimpinannya harus fokus terhadap peraturan yang ada dan menjalankan sebaik-baiknya. Dalam hal pengaruh kepemimpinan lurah dikategorikan kepemimpinan yang berorientasi pada tugas yang ditugaskan, dikarenakan kepemimpinan lurah merupakan kewenangan kepemimpinan yang didapatnya dari jabatannya sebagai lurah, yang merupakan bagian dari sistem peranan formal. Kewenangan tersebut merupakan kekuasaan legitimasi. Artinya kekuasaan yang melekat pada jabatan tersebut untuk meyakinkan bahwa individu yang berada dalam jabatan dibawahnya telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang ada.

Lurah merupakan Kepala Kelurahan yang merupakan perangkat Kecamatan yang membantu sebagian tugas camat seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005. Dengan demikian, lurah juga termasuk salah satu pemimpin birokrasi.

Menurut Miftah Thoha (1997:142) pemimpin birokrasi merupakan: “Pemimpin yang diangkat dalam suatu jabatan oleh pejabat yang berwenang. Dia menjadi pemimpin karena mengepalai suatu unit organisasi tertentu. Dia mempunyai bawahan atau staf sebagai pengikutnya. Para bawahan itu berada dibawah garis komandonya. Mereka berada disitu karena sudah diatur oleh yang berwenang mengaturnya. Dinamakan pemimpin karena pada wujudnya ia bertugas memimpin, mengarahkan, mengendalikan baik orang-orang yang ada di kesatuannya maupun fasilitas lain yang berada dalam wewenangnya”.

Dengan melihat penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh kepemimpinan lurah terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah apa yang dilakukan oleh lurah dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pelaksanaan aktual jabatan yang dipegangnya dalam rangka untuk mendorong atau mengajak aparat dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Dengan demikian hipotesis penelitian ini adalah

a. Hipotesis alternatif ( $H_a$ )

Terdapat pengaruh positif antara kepemimpinan lurah terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.

b. Hipotesis nihil ( $H_0$ )

Tidak terdapat pengaruh positif antara kepemimpinan lurah terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.

### **VARIABEL PENELITIAN**

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel kepemimpinan (X), indikatornya sebagai berikut:

- Memberikan motivasi kepada masyarakat, yaitu untuk mendapatkan hasil yang optimal
- Tanggung jawab sebagai pemimpin terhadap setiap keputusan yang diambil
- Keaktifan pemimpin dalam mendorong berpartisipasi dan memberi perhatian timbal balik dengan masyarakat

- Komunikasi, terdiri dari pemberian informasi oleh pemimpin, sebagai stabilisator , dan fasilitator.

2. Variabel Kesadaran Masyarakat dalam membayar PBB (Y), faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar PBB akan diukur melalui indikator-indikator berikut:

a. Struktur Sosial masyarakat

- Lingkungan dan kekayaan kulutural yang berkaitan dengan mentalitas masyarakat
- Tingkat pendidikan dan pengetahuannya tentang tujuan adanya PBB
- Kehidupan ekonomi masyarakat, apakah ia mampu atau tidak untuk membayar PBB

b. Sikap petugas dalam menagih PBB

- Cara petugas bersikap dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat akan kewajibannya dalam membayar PBB
- Usaha yang dilakukan petugas agar wajib pajak dapat menerima penjelasan dari petugas tentang tugasnya dalam menagih PBB

c. Pelayanan Pemerintah

- Usaha pemerintah dalam mensosialisasikan PBB
- Insentif pembayaran pajak, berupa pelayanan pemerintah yang lebih baik
- Keadilan perlakuan wajib pajak, disesuaikan dengan kemampuan membayar dari masyarakat

d. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak

- Adanya aspek kemudahan dalam memahami peraturan dan pengisian formulir PBB
- Proses pembayaran PBB yang mudah diikuti wajib pajak

e. Sanksi

- Pengetahuan wajib pajak tentang sanksi
- Penerapan sanksi tegas dan adil

## METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak PBB di sebelas kelurahan di Kota Padang. Kelurahan tersebut adalah yang target penerimaan PBB-nya tercapai dan atau mengalami peningkatan dengan jumlah tertinggi di setiap kecamatan selama tahun 2008, 2009 dan 2010.

Dalam penelitian, penelitian ini menggunakan teknik penentuan skor guna membantu dalam menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian. Teknik penentuan skor yang digunakan adalah dengan skala ordinal untuk menilai jawaban kuesioner responden. Kemudian ditentukan skala interval dengan membagi selisih skor tertinggi dan terendah dengan banyak bilangan.

Dalam menganalisis data untuk mengetahui korelasi variabel X terhadap Y digunakan rumus product momen (Sugiono, 2005). Nilai r akan menggambarkan berarti tidaknya r tersebut dan bagaimana tingkat hubungannya melalui tabel korelasi. Tabel korelasi menentukan batas r yang signifikan, bila r signifikan artinya hipotesis kerja atau hipotesis alternatif dapat diterima.

Pengujian hipotesis menggambarkan pengaruh antara X dan Y, maka diadakan pengujian dengan menggunakan rumus "t" (Sugiyono, 2005). Sedangkan uji koefisien determinan berguna mengetahui besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan nilai koefisien product moment  $(r_{xy})^2 \times 100\%$ .



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Klasifikasi Data

Jawaban responden dari masing-masing variabel diklasifikasikan atas : sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Maka terlebih dahulu ditentukan dengan skala interval dengan rumus

#### 1. Klasifikasi variabel Kepemimpinan

Data skor masing-masing responden setiap pertanyaan angket dari variable kepemimpinan dapat dilihat pada lampiran.

Skor tertinggi : 33

Skor terendah : 13

Banyaknya bilangan : 5

$$(33 - 13) / 5 = 4$$

Berdasarkan lampiran maka dapat diklasifikasikan data sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 4.25**  
**Klasifikasi Data Variabel Kepemimpinan**

No	Skor	F	%	Klasifikasi
1	33 - 37	1	1.8	Sangat Tinggi
2	28 - 32	29	52.7	Tinggi
3	23 - 27	13	23.6	Sedang
4	18 - 22	6	10.9	Rendah
5	13 - 17	6	10.9	Sangat rendah
		55	100	

Sumber : Hasil penelitian, data diolah (2011)

Berdasarkan tabel diatas diketahui dari 55 responden, 29 responden (52.7%) memiliki skor 28-32, 13 responden (23.6%) memiliki skor 23-27, 6 responden (10.9%) memiliki

skor 18–22 dan 13-17, dan 1 responden (1,8%) memiliki skor 33-37. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Lurah di Kota Padang dikategorikan tinggi.

## 2. Kesadaran Masyarakat

Data skor masing-masing responden setiap pertanyaan angket dari variabel kesadaran masyarakat dapat dilihat pada lampiran.

Skor tertinggi : 47

Skor terendah : 28

Banyaknya bilangan : 5

$$(47-28) / 5 = 3.8 \text{ (dibulatkan 4)}$$

Berdasarkan lampiran maka dapat diklasifikasikan data sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 4.26**

### **Klasifikasi Data Variabel Kesadaran masyarakat dalam membayar PBB**

No	Skor	F	%	Klasifikasi
1	44 – 47	2	3.6	Sangat Tinggi
2	40 – 43	19	34.5	Tinggi
3	36 – 39	24	43.6	Sedang
4	32 – 35	3	5.5	Rendah
5	28 – 31	7	12.7	Sangat rendah
		55	100	

Sumber : Hasil penelitian, data diolah (2011)

Berdasarkan tabel diatas diketahui dari 55 responden, 24 responden (43.6%) memiliki skor 36-39, 19 responden (34.5%) memiliki skor 40-43, 7 responden (12.7%) memiliki skor 28-31, 3 responden (5.5%) memiliki skor 32-35, dan 2 responden (3.6%) memiliki

skor 44-47. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikategorikan sedang.

### **Analisa Statistik**

Dengan menggunakan bantuan program SPSS 15 for window, diperoleh output sebagai berikut :

**Tabel 4.27**  
**Rangkuman Hasil Analisa Regresi Linear Sederhana**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.806	.223		12.596	.000
Kepemimpinan Lurah	.258	.057	.526	4.504	.000

a. Dependent Variable: Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Sumber : Hasil penelitian, data diolah (2011)

Dari tabel 4.26 dapat dibuat persamaan umum regresi sederhana :

$$Y = a + bx \Rightarrow Y = 2.806 + 0.258x$$

Keterangan :

Y = Kesadaran masyarakat dalam membayar PBB

X = Kepemimpinan lurah

a = nilai konstan (*intercept*)

b = koefisien regresi

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 2.806 mengindikasikan jika skor rata-rata kepemimpinan Lurah di Kota Padang adalah tetap atau nol, maka kesadaran masyarakat adalah sebesar 2.806, tidak mengalami kenaikan dan penurunan. Namun dengan adanya kepemimpinan lurah yang bernilai positif sebesar 0.258, mengindikasikan bahwa setiap skor rata-rata kepemimpinan lurah mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) satuan, maka kesadaran masyarakat akan mengalami peningkatan sebesar 0.258 satuan. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan adanya hubungan positif antara kepemimpinan lurah dengan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Artinya

semakin baik kepemimpinan lurah maka kesadaran masyarakat dalam membayar PBB cenderung akan meningkat.

## **Pengujian Hipotesis**

### **Uji Koefisien Korelasi (R)**

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai R berkisar antara 0 dan 1, nilai R yang mendekati angka 1, menunjukkan hubungan yang semakin kuat. Sebaliknya nilai R yang mendekati angka 0 menunjukkan hubungan yang terjadi semakin lemah.

Menurut Sugiyono (2007) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut :

0,00 – 0,199 = sangat rendah

0,20 – 0,399 = rendah

0,40 – 0,599 = sedang

0,60 – 0,799 = kuat

0,80 – 1,000 = sangat kuat

**Tabel 4.28**

**Hasil Uji Korelasi antara Kepemimpinan Lurah dengan Kesadaran Masyarakat dalam membayar PBB**

**Correlations**

		Peningkatan Kesadaran Masyarakat	Kepemimpinan Lurah
Pearson Correlation	Peningkatan Kesadaran Masyarakat	1.000	.526
	Kepemimpinan Lurah	.526	1.000
Sig. (1-tailed)	Peningkatan Kesadaran Masyarakat	.	.000
	Kepemimpinan Lurah	.000	.
N	Peningkatan Kesadaran Masyarakat	55	55
	Kepemimpinan Lurah	55	55

Sumber : Hasil penelitian, data diolah (2011)

Dari tabel 4.28 diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0.526. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sedang atau cukup kuat antara kepemimpinan lurah dengan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB yaitu sebesar 52.6%.

**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui persentase kontribusi sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika  $R^2$  sama dengan 0, menunjukkan tidak ada sedikitpun persentase pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen atau dapat dikatakan variasi variabel independen yang digunakan dalam model penelitian tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya jika  $R^2$  sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna atau dapat dikatakan variasi variabel independen yang digunakan dalam model penelitian menjelaskan 100% variasi variabel dependen.

Dengan menggunakan bantuan program *SPSS 15 for window* , maka hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) diperoleh seperti tampak pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.29**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.526 <sup>a</sup>	.277	.263	.33025

a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan Lurah

Sumber : Hasil penelitian, data diolah (2011)

Dari tabel 4.29 diketahui besar kontribusi yang disumbangkan kepemimpinan lurah dalam mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Dari hasil analisa regresi sederhana diperoleh nilai R Square sebesar 0.277. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh kepemimpinan lurah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB adalah sebesar 27.7%. Atau dapat dikatakan variasi kepemimpinan lurah yang digunakan dalam model mampu menjelaskan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sebesar 27.7% Sedangkan sisanya sebesar 72.3% adalah pengaruh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini seperti tingkat pendidikan masyarakat, pendapatan masyarakat, mentalitas masyarakat dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan masih banyak faktor lain yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.

### Uji t

Uji t dilakukan untuk membuktikan apakah variabel bebas (X), berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat (Y).

$H_0 : b = 0$  artinya kepemimpinan lurah tidak berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB di Kota Padang

Kriteria yang digunakan  $H_0$  diterima jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$ .

$H_1 : b \neq 0$  artinya kepemimpinan lurah berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB di Kota Padang.

Kriteria yang digunakan  $H_1$  diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$ .

**Tabel 4.30**

**Hasil Uji t**

Variabel Independen	Thitung	Sign	Keterangan
Kepemimpinan Lurah	4.504	0.000	Signifikan

Sumber : Hasil penelitian, data diolah (2011)

Dari tabel 4.30 diketahui diperoleh nilai t hitung untuk kepemimpinan lurah sebesar 4.504 dengan signifikansi sebesar 0.000. Jika dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  pada derajat bebas ( $df = n-k-1 = 55-1-1 = 53$ , dimana  $n =$  jumlah sampel, dan  $k =$  jumlah variabel independen, nilai  $t_{tabel}$  pada taraf kepercayaan 94% (signifikansi 5% atau 0,05) adalah 2.007. Dengan demikian  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4.504 > 2.007$ ) dan nilai signifikansi sebesar 0.000 ( $sig < 0,05$ ). Oleh karena nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_a$  diterima, artinya kepemimpinan lurah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Hal ini berarti bahwa semakin baik kepemimpinan lurah maka kesadaran masyarakat dalam membayar PBB cenderung semakin meningkat.

**Kesimpulan**

Penelitian ini membuktikan bahwa kepemimpinan Lurah di Kota Padang dikategorikan tinggi, ini disebabkan karena lurah menjalankan fungsi kepemimpinan dengan baik dan selalu mengikutsertakan masyarakat dalam hal pembayaran PBB. Lurah juga selalu

memberi pertanggungjawaban serta realisasi keputusan yang dibuatnya, dalam hal komunikasi lurah menerima masukan dan saran dengan baik. Kesadaran masyarakat di sebelas kelurahan di Kota Padang dikategorikan sedang karena masyarakat belum dengan benar memahami tentang pembayaran PBB, terbukti masih banyak yang keberatan dengan beban PBB-nya. Namun dalam hal mengetahui kewajiban dan mengerti tujuan PBB masyarakat sudah tergolong baik.

Berdasarkan perhitungan rumus dan ketentuan yang dipakai, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan lurah berpengaruh positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sebesar 27,7%.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kartono, 1984, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta ,Raja Grafindo Persada .
- Winardi, Dr, 2000, *Kepemimpinan dalam Manajemen* , Jakarta.,PT Rineka Cipta.
- Siagian, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia* , Jakarta, Bumi Aksara ..
- Toha, Miftah, 1987, *Prospektif Perilaku Birokrasi*, Jakarta, Rajawali Press.
- Kouzes & Posner, 2002, *Leadership The Challenge*, Jakarta, Airlangga .
- Soemitro, Rochmat, 1992, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Jakarta ,PT. Press co.
- Soemitro, Rochmat dan Muttaqin, Zainal, 2001, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Munawir, 1994, *Perpajakan*, Yogyakarta, Liberty .
- Musakabe, Herman, 2004, *Mencari Kepemimpinan Sejati Di Tengah Krisis dan Reformasi*, Jakarta, Citra Insan Pembaru
- Rivai, Veithzal, 2003, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta, Rajawali Press
- Suandy, Erly, 2003, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat.
- Zain, Mohammad, 2003 , *Manajemen Perpajakan*, Jakarta, Salemba Empat.
- Hasibuan, Malayu, S.P , 2004, *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*, Jakarta, Bumi Aksara



Widjadja, HW, 1984, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Era Swasta bekerjasama dengan Pemda DKI Jakarta.

Wiwoho B.(Editor), 1990, *Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan*, Jakarta, Bina Rena Pariwara

Mardiasmo, 2006, *Perpajakan edisi Revisi*, Jakarta, Andi

Sri, Valentina. S. Dan Suryo, Aji, 2003, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta, UPP AMP, YKPN.

Azwar, Syaifuddin, 1999, *Penyusun Skala Psikologi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Ghazali, Imam, 2006, *Statistik Multivariate*, BP. Undip, Semarang.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV.Alfabeta.

Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.